

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD  
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022  
BULAN JANUARI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR**

**A. Waktu Penyelenggaraan Rakor**

Selasa, 8 Februari 2022

**B. Pimpinan Rakor**

Sekretaris Dinas Perempuan dan Anak

**C. Peserta Rakor**

1. Pejabat Eselon III dan IV
2. Pejabat Fungsional
3. Admin masing-masing bidang, Sekretariat atau seksi atau Sub Bagian
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
5. Pelaksana pada masing-masing Sekretariat dan Bidang

**D. Notulis**

Pelaksana Sub Bag Program

**II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI**

**A. Realisasi sampai dengan bulan ini**

- a. Fisik = 5,56 %  
b. Keuangan = 899.828.079 (4,75%)

**B. Kegiatan yang berdeviasi fisik**

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	322.680.000			0		
1	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	314.520.000	8,33	0	0	(8,33)	Rekening belanja di Aplikasi e-Penatausahaan belum aktif
2	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000	8,33	0	0	(8,33)	Rekening belanja di Aplikasi e-

							Penatausahaan belum aktif
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.720.000				0	
1	Persiapan Pelaksanaan	1.720.000	29,07	0		0 (29,07)	
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>							
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>							
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>							
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	375.000				0	
1	Rapat Persiapan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan	375.000	100	0		0 (100)	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>							
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	195.131.000				13.019.950	
1	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	195.131.000	7,07	6,67		13.019.950 (0,40)	
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak</b>							

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	12.967.000			580.040	
1	Persiapan kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	12.967.000	4,56	4,48	580.040	(0,08)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat						
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.694.000			274.670	
1	Pelaksanaan pelatihan HAM bagi Kelompok Perempuan Rentan	9.694.000	3,01	2,83	274.670	(0,18)
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan ini :	7	0	0		
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	1	0	0		

### III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

#### Permasalahan

Pada bulan Januari terdapat 5 kegiatan yang berdeviasi negatif yaitu

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mengalami deviasi negatif karena ada sub kegiatan yang berdeviasi negatif yaitu :

- SK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada 2 SSK yg berdeviasi 0

- SK Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, ada 2 SSK yang berdeviasi negatif dikarenakan Rekening belanja di Aplikasi e-Penatausahaan belum aktif
  - SK Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ada 1 SSK yang berdeviasi negatif dan 1 SSK berdeviasi 0
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Rapat Persiapan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan.
  3. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  4. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Persiapan kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
  5. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi ada 1 SSK yang berdeviasi negatif yaitu Pelaksanaan pelatihan HAM bagi Kelompok Perempuan Rentan

#### Upaya

Upaya mengatasi permasalahan di 5 kegiatan yang berdeviasi negatif yaitu Percepatan pelaksanaan pada bulan Februari sesuai target pada E-RKO.

#### IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana kegiatan di bulan Februari sebagai berikut :

##### Sekretariat :

1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Administrasi Barang Milik, Daerah Pada Perangkat Daerah

##### Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan :

1. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.
2. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi
3. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kab/Kota
4. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi
6. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak kewenangan Provinsi

**Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak :**

1. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
3. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
5. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

**Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE :**

1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB

**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera :**

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat :**

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
4. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
6. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak :**

1. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
3. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
5. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

**Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan KIE :**

1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB

**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera :**

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat :**

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
4. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
6. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## V. PENUTUP

Kesimpulan pra rapat pengendalian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut :

Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perempuan dan Anak sampai dengan bulan Februari, sebagai berikut

No	Unit Kerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Deviasi
1	Dinas Perempuan dan Anak	5,11	5,56	4,75	0,45
2	Sekretariat	7,55	7,87	6,74	0,32
3	Bidang KHPP	0,52	0,84	0,90	0,32
4	Bidang PHPA	2,92	6,09	4,29	3,17
5	Bidang KB KIE	0,81	0,81	0,84	0
6	Bidang DALDUK KS	0,64	0,64	0,64	0
7	Bidang Data Parmas	1,87	2,73	1,93	0,87

Demikian laporan pelaksanaan pra rapat koordinasi pelaksanaan APBD Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Januari 2022, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Selasa 8 Februari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**



**Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM**

**NIP. 196811241993102001**